



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## DAMPAK KONFLIK RUSIA-UKRAINA TERHADAP SEKTOR ENERGI INDONESIA

**Hilma Meilani**

Peneliti Muda

[hilma.meilani@dpr.go.id](mailto:hilma.meilani@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Konflik Rusia-Ukraina menimbulkan ketidakpastian pasokan energi dunia, yang berpengaruh terhadap harga komoditas energi. Per 8 Maret 2022 harga minyak mentah jenis Brent mencapai US\$128,75 per barel, dan harga batu bara dunia mencapai US\$407,05 per metrik ton, tertinggi sejak tahun 2008. Harga gas *Contract Price Aramco* (CPA) mencapai US\$ 775 per metrik ton, naik 21% dari rata-rata CPA tahun 2021. Rusia merupakan pemasok 16,35% komoditas energi utama global (minyak bumi, gas, dan batu bara).

Kenaikan harga batu bara akan meningkatkan nilai ekspor karena Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar dunia, namun pemerintah perlu menjaga penyaluran DMO (*Domestic Market Obligation*) untuk pembangkit listrik. Kementerian ESDM menetapkan harga batu bara acuan (HBA) sebesar US\$203,69 per ton pada Maret 2022, melonjak US\$15,31 per ton dari Februari 2022 (US\$188,38 per ton). Pada 1 Maret 2022 pemerintah menetapkan pengenaan denda dan dana kompensasi bagi perusahaan batu bara yang melanggar ketentuan pemenuhan DMO, yang tercantum dalam PMK No.17/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kenaikan harga migas juga berpengaruh karena Indonesia merupakan net importir migas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas Indonesia tahun 2021 mencapai US\$196,20 miliar, atau setara US\$2.805 triliun (kurs Rp14.300/US\$), meningkat 38,59% dibandingkan dengan tahun 2020 (US\$141,57 miliar atau setara Rp2.024 triliun). Sedangkan impor migas per Februari tahun 2022 sebesar US\$2,90 miliar, naik 30,9% dari Januari tahun 2022 (US\$2,23 miliar), disebabkan naiknya *Indonesian Crude Price* (ICP) dari US\$85,89 per barel pada Januari tahun 2022 menjadi US\$95,72 per barel pada Februari tahun 2022.

Kenaikan ICP akan menambah beban subsidi BBM dan LPG serta kompensasi BBM dalam APBN, karena asumsi ICP dalam APBN 2022 sebesar US\$63 per barel. Subsidi BBM dan LPG 3 kg dalam APBN 2022 sebesar Rp77,5 triliun. Setiap kenaikan ICP sebesar US\$1 per barel akan berdampak pada kenaikan subsidi LPG Rp1,47 triliun, subsidi minyak tanah Rp49 miliar, beban kompensasi BBM Rp2,65 triliun. Selain itu juga berdampak pada tambahan subsidi dan kompensasi listrik Rp295 miliar, karena masih terdapat penggunaan BBM dalam pembangkit listrik. Kenaikan harga migas juga berdampak pada sektor transportasi dan industri yang mengonsumsi BBM nonsubsidi. Per 1 Maret 2022 Pertamina menaikkan harga jual BBM nonsubsidi, LPG 12 kg dan 5,5 kg. Harga jual tinggi dapat berdampak pada inflasi dan memengaruhi daya beli masyarakat. Gejolak harga komoditas energi dunia menjadi momentum bagi Indonesia untuk akselerasi pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pemerintah perlu mendorong EBT sebagai sumber energi alternatif melalui kebijakan transisi energi.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih



<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya Waras S.  
Dewi Wuryandani  
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

## Atensi DPR

Kenaikan harga komoditas energi dan ketersediaan energi perlu mendapat perhatian oleh DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi. Dari sisi pengawasan, Komisi VII DPR RI perlu mengawal agar pemerintah terus mengamankan pasokan BBM dan LPG, mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran, dan meningkatkan pengawasan terhadap penerapan kebijakan DMO batu bara. Terkait volatilitas harga energi fosil, Komisi VII DPR RI perlu mengawal dan mendorong pemerintah untuk merealisasikan kebijakan dan program transisi energi agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Dari sisi legislasi, Komisi VII DPR RI bersama pemerintah perlu segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan untuk mempercepat transisi energi dalam upaya mencapai ketahanan dan kemandirian energi nasional.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 1, 7, 8, dan 14 Maret 2022;

*Kompas*, 1 Maret 2022;

*Media Indonesia*, 8 Maret 2022; dan

[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id), 8 Maret 2022.